

**Tata Kelola Pemerintah dalam Integrasi Adat Melayu pada Pembangunan
Berkelanjutan di Pulau Penyengat
Kota Tanjungpinang**

Oleh:

Muhammad Adib Farhan

Nim. 2205020071

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan melalui penerapan nilai adat Melayu. Pulau Penyengat sebagai kawasan living heritage memiliki potensi budaya Melayu yang besar, namun implementasi pembangunannya masih menghadapi kendala berupa koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat yang masih terbatas, serta belum maksimalnya penerapan adat Melayu dalam kebijakan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintah dalam mengintegrasikan adat Melayu ke dalam pembangunan berkelanjutan di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan berpedoman pada teori Tata Kelola Interaktif Kooiman yang meliputi interaksi antar aktor, koordinasi kebijakan, integrasi adat Melayu, legitimasi sosial, dan kapasitas adaptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah telah berjalan, tetapi belum optimal. Hal ini terlihat dari koordinasi dan kolaborasi yang telah terbangun, meskipun partisipasi masyarakat dan tokoh adat serta sinergi antar pemangku kepentingan masih perlu diperkuat. Adat Melayu telah diimplementasikan melalui pelestarian kawasan cagar budaya, kegiatan budaya Melayu, dan pengembangan pariwisata budaya, namun penerapannya belum sepenuhnya menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan. Faktor pendukung meliputi kuatnya budaya Melayu, dukungan pemerintah, kerja sama antar pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan perkembangan sektor pariwisata. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya pelibatan tokoh adat, pengembangan UMKM berbasis budaya yang masih terbatas, pembangunan fisik yang belum sepenuhnya mencerminkan budaya Melayu, serta pemanfaatan fasilitas yang belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Pulau Penyengat memerlukan tata kelola yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan adaptif agar adat Melayu dapat terintegrasi secara optimal dalam setiap tahapan pembangunan.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintah, Integrasi Adat Melayu, Pembangunan Berkelanjutan, Pulau Penyengat

Government Governance in Integrating Malay Customs into Sustainable Development on Penyengat Island, Tanjungpinang City

By:

Muhammad Adib Farhan

Nim. 2205020071

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of sustainable development that integrates economic, social, cultural, and environmental aspects through the application of Malay customary values. Penyengat Island, as a living heritage area, holds significant Malay cultural potential; however, its development implementation still faces obstacles, including suboptimal coordination among stakeholders, limited involvement of the community and customary leaders, and the not yet maximized application of Malay customs in development policies. This research aims to analyze government governance in integrating Malay customs into sustainable development on Penyengat Island, Tanjungpinang City, as well as to identify its supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model, guided by Kooiman's Interactive Governance theory, which covers interaction among actors, policy coordination, integration of Malay customs, social legitimacy, and adaptive capacity. The results show that government governance has been running but is not yet optimal. This is reflected in the coordination and collaboration that have been established, although community and customary leader participation as well as synergy among stakeholders still need to be strengthened. Malay customs have been implemented through the preservation of cultural heritage areas, Malay cultural activities, and the development of cultural tourism, but their application has not yet fully become the basis for development policies. Supporting factors include the strong Malay culture, government support, cooperation among stakeholders, community participation, and the development of the tourism sector. Meanwhile, inhibiting factors include limited facilities and infrastructure, the not yet optimal involvement of customary leaders, limited development of culture-based MSMEs (micro, small, and medium enterprises), physical development that does not yet fully reflect Malay culture, and the underutilization of existing facilities. This research concludes that sustainable development on Penyengat Island requires more collaborative, participatory, and adaptive governance so that Malay customs can be optimally integrated at every stage of development.

Keywords: Government Governance, Malay Customs Integration, Sustainable Development, Penyengat Island